

Press Release Webinar Dialog Publik**Food Estate, Sengkarut Lumbung Pangan Indonesia**

Jumat, 23 September 2022

Berbagai literatur dan dialog telah mengamini bahwa krisis pangan secara global karena keterbatasan distribusi memang nyata adanya. Untuk menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program Strategis Nasional (PSN) bertajuk Food Estate yang diklaim mampu mengatasi ancaman tersebut. Sayangnya, ketidakpercayaan publik tentang pelaksanaan, pengelolaan, dan hasil dari pengadaan lumbung pangan ini terus saja mengemuka. Mulai dari keraguan pada perlindungan ekosistem rawa gambut, hutan lindung, dan wilayah kelola sumber pangan lokal, hingga kemanjuran Food Estate dalam menghadapi acaman krisis pangan.

Jika menengok dokumen National Determined Contributions (NDC) yang diperbarui pada tahun 2021, pemerintah memiliki komitmen baru dengan menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon sebesar 24,1%. Alih-alih mengembalikan fungsi ekosistem gambut dan hutan lindung seperti sedia kala, pemerintah justru terus menggebu untuk melakukan ekstensifikasi lahan Food Estate seluas ratusan ribu hektar di beberapa daerah bergambut seperti Kapuas, Pulang Pisau, Penajam Paser Utara, dan sebagainya. Beberapa literatur yang bukan hasil publikasi dari pemerintah pun menyebutkan jika hasil panen Food Estate ternyata mengecewakan.

Maladinitrasi pun juga ditemukan seperti adanya kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan, serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan AHSP pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik dalam program Food Estate pada Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp27,97 milyar. Sehingga, tidak aneh jika muncul sentimen dari publik bahwa Food Estate menjadi kebijakan kejar tayang yang minim kajian, terburu-buru, dan bertentangan dengan azas keterbukaan dan kepastian hukum.

Untuk menguraikan permasalahan sistem pangan di Indonesia beserta kondisi terbaru tentang apa yang terjadi di daerah yang menjadi lokasi Food Estate dan menyambut Hari Tani Nasional, pada hari ini, 23 September 2022, Pantau Gambut bersama dengan Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) Institut Pertanian Bogor, PUSAKA, WALHI Kalimantan Tengah, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Sumatera Utara mengadakan diskusi publik yang diselenggarakan secara daring. Adapun beberapa poin paparan dari masing-masing narasumber:

Dr. Agr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si., Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB mengatakan: Kata Estate dalam Food Estate memberikan makna skala luas. Sementara itu, korporasi tidak akan tertarik untuk bermain di skala kecil. Sehingga, proyek ini akan menjadi *bankable* karena mereka hanya memberikan kredit, bukan bantuan ke petani. Korporasi juga tidak akan banyak menanggung risiko karena semua risiko akan ditanggung oleh petani. Begitu juga pemerintah, mereka mengejar swasembada pangan dari FE hanya untuk dijadikan sebagai prestasi politik. Sistem pangan berbasis lokal, sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan lah yang sejatinya bisa membangun sistem pangan yang kuat.

Iola Abas, Pantau Gambut mengatakan: Yang paling krusial pada skoring Global Food Security Index milik Indonesia adalah kategori *sustainability* dan *adaptation*. Ada tiga poin di kategori tersebut yang memiliki nilai rapor yang sangat jelek, yaitu *exposure*, *land*, dan *political commitment to adaptation*. Sehingga dapat disimpulkan kalau sistem tata kelola pangan kita yang masih amburadul.

Antisipasi krisis pangan memang perlu dilakukan, tapi Food Estate bukan jawaban dan tidak layak dilanjutkan. Karena yang menyebabkan krisis pangan terjadi justru karena alih fungsi lahan produktif dan rantai pasok yang terlalu panjang. Harus ada keseimbangan upaya antara apa yang memang dibutuhkan dengan perkiraan dampak yang akan datang.

Delima Silalahi, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Sumatera Utara mengatakan: Pemerintah mengangkat isu global seperti perubahan iklim hanya untuk mendapatkan pemasukan karena Food Estate lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat di Humbang Sudutan, Sumatera Utara. Dari refleksi 2 tahun program FE di Humbang Sundutan, banyak ditemukan bukti pemborosan anggaran, meningkatnya konflik agraria, peminggiran masyarakat adat, dan hilangnya tanaman endemik yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Pemerintah bukannya melindungi petani, namun malah membiarkan petani untuk saling berkompetisi.

Frangky Samperante, PUSAKA mengatakan: Berbeda dengan diskursus yang disampaikan Jokowi, tidak ada krisis pangan di Papua! Bahkan, di Merauke terjadi *over supply* beras. Ada pula kontradiksi antara pembangunan Papua dari sisi masyarakat lokal/pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Masyarakat dan Pemerintah Papua memiliki Visi Papua 2100 dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan kualitas hidup dengan mempertahankan 90% kawasan hutan dan 60% kawasan lindung. Sementara pembangunan Papua dari sisi pemerintah pusat adalah percepatan pembangunan di Papua yang dipimpin badan khusus bentukan Presiden RI.

Bayu Herinata, WALHI Kalimantan Tengah mengatakan: Dari 700 hektare lahan untuk FE yang sudah dibuka tanpa adanya ijin dan kajian analisis dampak lingkungan, sudah ditanami singkong seluas 300 hektare. Sementara, penanaman dilakukan oleh kontraktor/pihak ketiga dan pekerja dari luar daerah. Padahal tidak dibenarkan aktivitas pihak ketiga untuk mengerjakan FE kalau izinnya sedniri belum diterbitkan. Sehingga, program Food Estate singkong di Kalimantan Tengah harus dihentikan, dievaluasi, dan pemerintah harus mengembalikan pemenuhan ketersediaan pangan kepada masyarakat!

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di 9 provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Publik bisa memantau berbagai isu mengenai lahan gambut melalui data yang tersaji dalam platform ini. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.

Kontak Media

Anda dapat mengakses rekaman Webinar Media Briefing melalui tautan [Media Kit](#).

Jika Anda membutuhkan panduan, konsultasi, maupun materi visual terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Yoga Aprillianno	yoga.aprillianno@pantaugambut.id	081390203344
Dimas Hartono	dimas.hartono@pantaugambut.id	081352704704
Pantau Gambut	ask@pantaugambut.id	